

HASIL HARMONISASI	PERBAIKAN	CATATAN
<div></div> <div>BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</div> <div>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN..... TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA</div>	<div></div> <div>BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</div> <div>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN..... TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA</div>	
Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan	

<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>Catatan. Dalam UU Ciptaker Pasal 63 ayat (3) huruf c tidak mendelegasikan langsung dalam Peraturan Daerah, maka disarankan</p>	<p>dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p>	
--	--	--

dalam ketentuan menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis.		
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. mor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. mor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang	

<p>Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan</p>	<p>Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	
---	---	--

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	

<p>dan</p> <p>BUPATI KUTAI KARTANEGARA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG</p> <p>RENCANA PERLINDUNGAN</p> <p>DAN PENGELOLAAN</p> <p>LINGKUNGAN HIDUP.</p>	<p>dan</p> <p>BUPATI KUTAI KARTANEGARA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG</p> <p>RENCANA PERLINDUNGAN DAN</p> <p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN</p> <p>HIDUP.</p>	
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 2</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	

<p>di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.</p> <p>7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p>	<p>di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.</p> <p>7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p> <p>8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan</p>	
--	--	--

<p>8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p>	<p>tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p>	
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.</p>	

(2) Sasaran RPPLH meliputi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	(2) Sasaran RPPLH meliputi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kondisi wilayah merupakan hasil pengolahan data dan informasi Lingkungan Hidup berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. potensi dan kondisi Lingkungan Hidup;b. upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan kejadian bencana; danc. pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kondisi wilayah merupakan hasil pengolahan data dan informasi Lingkungan Hidup berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. potensi dan kondisi Lingkungan Hidup;b. upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan kejadian bencana; danc. pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah sesuai dengan peta jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air dan peta jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia pangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah sesuai dengan peta jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air dan peta jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia pangan.</p>	

<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PENYUSUNAN RPPLH PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bupati menyusun RPPLH.</p> <p>(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh ekoregion darat dan laut.</p> <p>(3) Penyusunan RPPLH memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;</p> <p>b. sebaran penduduk;</p> <p>c. sebaran potensi sumber daya alam;</p> <p>d. kearifan lokal;</p> <p>e. aspirasi masyarakat; dan</p> <p>f. perubahan iklim.</p> <p>(4) RPPLH memuat rencana tentang :</p> <p>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</p> <p>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;</p> <p>c. pengendalian, pemantauan, serta</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PENYUSUNAN RPPLH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Bupati menyusun RPPLH.</p> <p>(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh ekoregion darat dan laut.</p> <p>(3) Penyusunan RPPLH memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;</p> <p>b. sebaran penduduk;</p> <p>c. sebaran potensi sumber daya alam;</p> <p>d. kearifan lokal;</p> <p>e. aspirasi masyarakat; dan</p> <p>f. perubahan iklim.</p> <p>(4) RPPLH memuat rencana tentang :</p> <p>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</p> <p>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;</p> <p>c. pengendalian, pemantauan, serta</p> <p>d. pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;</p>	
--	---	--

<p>d. pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;</p> <p>e. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan; dan</p> <p>f. iklim.</p> <p>(5) Sistematika Penyusunan dokumen RPPLH sebagai berikut :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN;</p> <p>BAB KONDISI DAN INDIKASI</p> <p>II DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;</p> <p>BAB PERMASALAHAN DAN</p> <p>III TARGET LINGKUNGAN HIDUP;</p> <p>BAB ARAHAN RENCANA</p> <p>IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>BAB ARAHAN RENCANA</p> <p>V PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN</p>	<p>e. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan; dan</p> <p>f. iklim.</p> <p>(5) Sistematika Penyusunan dokumen RPPLH sebagai berikut :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN;</p> <p>BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;</p> <p>BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP;</p> <p>BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH;</p> <p>BAB V ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINTAS DAERAH.</p> <p>(6) Sistematika RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam</p>	
---	---	--

<p>LINGKUNGAN HIDUP LINTAS DAERAH. Kabupaten/Kota</p> <p>(6) Sistematika RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Pasal 11</p> <p>1) Target RPPLH untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>2) Target RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) dengan menggunakan IKLH.</p> <p>3) Target dan jenis program dan kegiatan yang terdapat dalam RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif. (catatan: untuk dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal).</p>	<p>BAB IV</p> <p>TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Target RPPLH untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>(2) Target RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Target dan jenis program dan kegiatan yang terdapat dalam RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif.</p>	

Catatan. disarankan dijelaskan dalam ketentuan umum karena sering disebutkan dalam batang tubuh.		
<p>BAB V ARAHAN, KEDUDUKAN DAN VERIFIKASI RPPLH</p> <p>Pasal 13</p> <p>Arahan RPPLH memuat rencana tentang :</p> <p>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</p> <p>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;</p> <p>c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan</p> <p>d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p>	<p>BAB V ARAHAN, KEDUDUKAN DAN VERIFIKASI RPPLH</p> <p>Pasal 14</p> <p>Arahan RPPLH memuat rencana tentang:</p> <p>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</p> <p>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;</p> <p>c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan</p> <p>d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p>	
<p>Pasal 15</p> <p>RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.</p>	
<p>Pasal 17</p>	<p>Pasal 18</p>	

<p>Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati melakukan verifikasi RPPLH dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>Disarankan dijelaskan dalam ketentuan umum atau penjelasan pasal demi pasal pemerintah provinsi dimaksud.</p>	<p>Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati melakukan verifikasi RPPLH dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Peran masyarakat dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawas sosial;b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atauc. penyampaian informasi dan/atau laporan. <p>(3) Peran masyarakat dilakukan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	<p style="text-align: center;">BAB VI PERAN MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(4) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(5) Peran masyarakat dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengawas sosial;b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atauc. penyampaian informasi dan/atau laporan. <p>(6) Peran masyarakat dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	

<p>b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;</p> <p>c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;</p> <p>d. menumbuhkembangkan kecepatan daya tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan</p> <p>e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p>	<p>b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;</p> <p>c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;</p> <p>d. menumbuhkembangkan kecepatan daya tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan</p> <p>e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p>	
<p>BAB VII</p> <p>MONITORING, PELAPORAN, REVIEW PENINJAUAN DAN PENGENDALIAN RPPLH</p> <p>RENCANA—PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.</p> <p>(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p>BAB VII</p> <p>MONITORING, PELAPORAN, PENINJAUAN DAN PENGENDALIAN RPPLH</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.</p> <p>(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	
<p>Pasal 23</p>	<p>Pasal 24</p>	

Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di Daerah kepada Menteri.	Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di Daerah kepada Menteri.	
<p>Pasal 25</p> <p>Peninjauan terhadap RPPLH dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Peninjauan terhadap RPPLH dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.</p>	
<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pencegahan;</p> <p>b. penanggulangan; dan</p> <p>c. pemulihan.</p> <p>(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.</p>	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>d. pencegahan;</p> <p>e. penanggulangan; dan</p> <p>f. pemulihan.</p> <p>(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.</p>	

<p>BAB VIII</p> <p>PENDANAAN</p> <p>Pasal 29</p> <p>Pembiayaan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>BAB VIII</p> <p>PENDANAAN</p> <p>Pasal 30</p> <p>Pembiayaan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan</p>	<p>Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal</p>	

<p>pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal BUPATI KUTAI KARTANEGARA, EDI DAMANSYAH</p> <p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, SUNGONO</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR ...</p>	<p>BUPATI KUTAI KARTANEGARA, EDI DAMANSYAH</p> <p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, SUNGONO</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR ...</p>	
---	---	--

<p>PENJELASAN</p> <p>ATAS</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI</p> <p>KARTANEGARA</p> <p>NOMOR...TAHUN 20..</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PERLINDUNGAN DAN</p> <p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>I. UMUM</p> <p>Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah, sedangkan akibat kegiatan yang</p>	<p>PENJELASAN</p> <p>ATAS</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI</p> <p>KARTANEGARA</p> <p>NOMOR...TAHUN 20..</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PERLINDUNGAN DAN</p> <p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>III. UMUM</p> <p>Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah, sedangkan akibat kegiatan yang</p>	
--	--	--

<p>telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup akibat dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.</p> <p>RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip :</p>	<p>telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup akibat dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.</p> <p>RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip :</p>	
--	--	--

<p>a.harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;</p> <p>b. keberlanjutan;</p> <p>c.karakteristik ekoregion;</p> <p>d. kerjasama antar daerah;</p> <p>e.kepastian hukum; dan</p> <p>f. keterlibatan pemangku kepentingan.</p> <p>Peran strategi RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.</p> <p>Dalam kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>	<p>g.harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;</p> <p>h. keberlanjutan;</p> <p>i. karakteristik ekoregion;</p> <p>j. kerjasama antar daerah;</p> <p>k. kepastian hukum; dan</p> <p>l. keterlibatan pemangku kepentingan.</p> <p>Peran strategi RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.</p> <p>Dalam kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>	
--	--	--

<p>II.PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 3</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 4</p> <p>Yang dimaksud dengan Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air adalah peta yang disusun dengan meng”overlay”kan 3 (tiga) peta yaitu Peta Bentang Lahan, Peta Tipe Vegetasi dan Peta Tutupan Lahan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan keperluan air yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yang disediakan oleh lingkungan.</p> <p>Yang dimaksud dengan Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan adalah peta yang disusun dengan meng”overlay”kan 3 (tiga) peta yaitu Peta Bentang Lahan, Peta Tipe Vegetasi dan Peta Tutupan Lahan dengan memperhitungkan jumlah penduduk</p>	<p>IV. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 3</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 4</p> <p>Yang dimaksud dengan Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air adalah peta yang disusun dengan meng”overlay”kan 3 (tiga) peta yaitu Peta Bentang Lahan, Peta Tipe Vegetasi dan Peta Tutupan Lahan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan keperluan air yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yang disediakan oleh lingkungan.</p> <p>Yang dimaksud dengan Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan adalah peta yang disusun dengan meng”overlay”kan 3 (tiga) peta yaitu Peta Bentang Lahan, Peta Tipe Vegetasi dan Peta Tutupan Lahan dengan memperhitungkan jumlah penduduk</p>	
--	---	--

<p>dan keperluan pangan yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yang disediakan oleh lingkungan.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 6</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 7</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 8</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 9</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 10</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 11</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 12</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 13</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 14</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>dan keperluan pangan yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yang disediakan oleh lingkungan.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 6</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 7</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 8</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 9</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 10</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 11</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 12</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 13</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 14</p> <p>Cukup jelas</p>	
---	---	--

<p>Pasal 15</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 16</p> <p>Cukup jelas</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR ...</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 16</p> <p>Cukup jelas</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR ...</p>	
<p>Dokumen Lampiran RPPLH Terlampir bukan di Matriks</p>		